



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 110 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PACET
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pacet Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 144 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Berita daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 42);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PACET KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

- a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
- b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- e. Penutup; dan

- f. Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
 - a. Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
 - c. Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

- (1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

- (1) Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
- (2) Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
- (3) Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
- (4) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

- a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
- b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
- c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
- (3) Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 25 Juni 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 25 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 110

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

Pemerintah
Kabupaten Bandung



BUPATI BANDUNG PERATURAN

PERUBAHAN RENCANA
KERJA PERANGKAT
DAERAH

TAHUN 2025



KECAMATAN PACET
KABUPATEN BANDUNG

KATA PENGANTAR

Guna memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam permendagri no 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah, Perubahan Renja ini disusun berdasarkan kebutuhan yang disusun meskipun belum dilakukan analisis real kebutuhan untuk tahun 2025 namun demikian ini merupakan sebuah proses menuju perencanaan kerja yang komprehensif guna menjalankan program dan kegiatan di Kecamatan Pacet

Bahwa Perencanaan merupakan suatu proses dinamis yang harus disesuaikan dengan sumber daya organisasi sebagai konsekuensi logis dari perubahan lingkungan organisasi, artinya, guna mempertegas arah kebijakan pemerintah Kecamatan Pacet sebagai upaya mengantisipasi kebutuhan dan upaya penyelerasan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahunan dan rencana tahunan guna mendukung dan menjalankan Visi dan Misi kabupaten Bandung Tahun 2025 – 2029.

Demikian Perubahan Rencana Kerja ini disusun sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada, dan dalam rangka penyempurnaan dalam penyusunan perencanaan ,kritik dan saran serta masukan sangat kami butuhkan mengingat dalam penyusunan Kami sangat menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan.

Pacet, 9 Juli 2024

Camat Pacet



ASEP SUSANTO, S.STP., MM
NIP. 19800207 200003 1
002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU	6
1.1 Hasil Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah	26
1.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	28
1.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	31
1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	40
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	56
1.5 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	56
1.5 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	60
1.5 Program Kegiatan	61
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	66
BAB IV PENUTUP	76
LAMPIRAN :	
1. Formulir Pengendalian	
2. SK- Renja Tahun 2025	
3. SK- Tim Penyusun	
4. TC. 29	
5. TC. 30	
6. TC. 31	
7. TC. 33	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah pada paragraf 2 yang mengatur tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disebutkan pada pasal 126 ayat (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, paling lambat minggu pertama bulan Desember, sehingga Renja merupakan bagian yang harus dilaksanakan dari proses perencanaan kerja perangkat Daerah termasuk Kecamatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sebuah perencanaan kerja di tingkat perangkat daerah.

Penyusunan Perubahan renja Kecamatan Pacet tentunya dengan Pagu Teknoratik yang belum dilakukan analisis terhadap kebutuhan nyata di Kecamatan Pacet namun demikian Renja ini merupakan bagian dari proses yang harus dilaksanakan agar tingkat kesesuai anggaran yang tersedia dapat sesuai dengan kebutuhan pada rancangan akhir Rencana Kerja Tahun 2025

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang – undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 25 ayat (6) menyebutkan bahwa Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan sebagian pelaksanaannya kepada camat untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai PD yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang diharapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat mendorong terhadap capaian kinerja yang optimal dengan memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten.

Berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.580-Adpem/2018 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Pacet, terdiri dari 29 bidang kewenangan dan 24 Sub bidang Kewenangan serta 320 Rincian Pelimpahan kewenangan, dengan jenis pelimpahan antara lain: Rekomendasi, Koordinasi, Pengendalian, fasilitasi, Penyelenggaraan, dan Perizinan.

Dalam rangka memberikan acuan terhadap pengukuran kinerja yang memberikan gambaran terhadap capaian Kinerja, Rencana Kerja (Renja) merupakan Dokumen Penting dan strategis sehingga menjadi variabel dari penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Disamping itu, isu strategis dan potensi yang ada sangat diperhatikan dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2025.

Peyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pacet Tahun 2025 disusun berdasarkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan serta Target yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Pacet Tahun 2025 – 2029 dan juga menyeleraskan dengan dokumen perencanaan Kabupaten Bandung (RPJMD dan RKPD) sehingga dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. PP No.12/2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang system Pemerintahan berbasis Elektronik;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86/2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang rencana pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana pembangunan jangka panjang Daerah , Rencana pembangunan jangka menengah Daerah , dan rencana kerja pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90/2019 tentang klasifikasi, Kodefikasi dan Momen Klatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70/2019 tentang system Informasi Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889/2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan momenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah.
9. Perda No. 8/2021 tentang perubahan RPJMD Propinsi Jawa barat tahun 2018-2023.
10. Peraturan Daerah Nomor 7/2011 tentang Rencana Pembangunan jangka panjang Kabupaten Bandung tahun 2005-2025.
11. Perda No.9/2021 tentang RPJMD kabupaten Bandung tahun 2021-2026
12. Peraturan Bupati Bandung No. dung Nomor : 137.1/Kep.465-Tapem/2022 Tentang : Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah daerah dari Bupati Kepada Camat;
13. Surat Edaran Bupati Bandung Nomor DL.03.01/4382/BAPELITBANGDA tanggal 9 Desember 2024 tentang Agenda penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2024;
14. Keputusan Bupati Bandung No.137.1/Kep.615 KASOTDA /2019 Tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Disusunnya Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan untuk :

1. Menyusun Dokumen Perencanaan Tahun 2025

2. Sebagai pedoman dan arah melaksanakan program kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan Prioritas Kabupaten Bandung
3. Sebagai tolok ukur dalam pencapaian strategi dan kebijakan umum pembangunan yang berkelanjutan di Kecamatan Pacet

1.4 Mekanisme Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Kecamatan Pacet, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Latar Berakang

1.1

Memuat tentang Renja Kecamatan Pacet, proses penyusunan Renja Kecamatan Pacet, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra dengan Renja

Landasan Hukum

1.2

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja Kecamatan Pacet Tahun 2025

Maksud dan Tujuan

1.3

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Pacet.

Sistematika Penulisan

1.4

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Pacet serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Kecamatan Pacet Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1)

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Pacet
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pacet
- 2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pacet

- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pacet
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Pacet Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pacet.
- 3.3 Program dan Kegiatan Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANANAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PACET

2.1

Evaluasi Renja Kecamatan Pacet Tahun Lalu dan Capaian renstra Kecamatan

Bahwa sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Pacet telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2025 dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (tahun 2025), bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2025 – 2029 telah dilaksanakan dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan renja tahun 2025, dan realisasi renstra OPD Kecamatan Pacet yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana tabel 2.1 (***Tabel Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan tahun berjalan***).

Evaluasi Hasil Capaian Kinerja terhadap Rencana Kerja Tahun 2024 dan Tahun berjalan (2025) didasarkan pada DPA Kecamatan Pacet TA 2024 dengan memperhatikan pula Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 dan evaluasi Tahun 2024 disesuaikan dengan hasil infut data e-monev pada e-monev BAPPEDA kabupaten Bandung yang dimaksudkan agar data yang tersaji menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan obyektif.

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Utama
Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	83,66	87,06	104,06 Poin
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP)	poin	72,64	80,10	110,20 Poin
3.	Persentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik	%	83,30	90,95	109,53%
4.	Persentase Desa Ceopat Berkembang	Desa	1	1	100%

Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Realisasi Program yang menunjang terhadap kinerja utama memberikan gambaran :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Realisasi Program yang tidak memenuhi target Kinerja tidak ada dikarenakan program dan kegiatan telah ada pada Nomor Rekening yang lain.

2. **Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.**

Secara Keseluruhan Target Kegiatan sesuai dengan target dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam perencanaan meskipun dalam penggunaan atau penyerapan anggaran terdapat kegiatan yang penyerapannya hanya 32% persen namun dalam capaian kinerjanya mencapai 100% , hal tersebut dikarenakan pada anggaran tersebut ada alokasi lain yang sudah menutupi kinerja, walaupun demikian guna menunjang IKU tetap kegiatannya dilaksanakan.

3. **Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Pada capaian Program dan Kegiatan terdapat capaian yang melebihi dari target, yaitu pada pelaksanaan kegiatan Hari – hari bersejarah, dimana kegiatan melampaui target, hal tersebut diakibatkan adanya koordinasi yang baik antar instansi di Kecamatan sehingga kegiatan melampaui target Kegiatan yang dilaksanakan.

4. **Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.**

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kegiatan meskipun ada namun bisa diatasi dengan monitoring dan evaluasi intern dan ditindak lanjuti dengan Koordinasi dengan pihak terkait., kendala tersebut adalah adanya pada pelayanan KTP dan KK dimana Blanko sering tidak mencukupi dan Jaringan yang terkadang lambat.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Capaian Kinerja di Kecamatan Pacet yang hampir secara keseluruhan mencapai 100% tentu ada akan ada implikasi negatif terhadap Renstra, namun demikian kesesuaian pada pagu Anggaran terdapat seslilih capaian sebagaimana disebutkan di atas, namun hal tersebut tidak berakibat terhadap kinerja.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor faktor penyebab tersebut.

Meskipun Kendala pada pelaksanaan Program/Kegiatan berjalan lancar namun masih terdapat kendala atau adanya sebuah Resiko yang dapat menghambat terhadap capaian Kinerja antara lain :

- a. Paktor Pelayanan Publik belum berjalan secara optimal dikarenakan adanya sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan
- b. SDM aparatur khususnya dalam bidang pelayanan Publik
- c. Perubahan Kebijakan/Aturan

Data Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu (2023) sebagaimana pada tabel 1 dibawah ini

Tabel 2.2 (T-C.29)

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
Sampai Dengan Tahun 2021-2026 Kabupaten Bandung**

Nama PD		: Kecamatan Pacet													
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025				
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)			(7)	(8)=(7/6)	-9	(10)	(11)=(5+7+10)	(12)=(11/4)
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7.01	KECAMATAN						76,20		80,10		105				
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	77,06	Poin	75,90	Poin	76,20	Poin	80,10	Poin	105	80,5	0	80,10	103,94
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	0	66,67	66,67
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	2	Dok	1	Dok	2	Dok	200	1	0	4,00	80,00

7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	2	Dok	1	Dok	1	Dok	100	1	0	3,00	60,00
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	2	Dok	1	Dok	1	Dok	100	1	0	3,00	60,00
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	3	Dok	1	Dok	1	Dok	100	1	0	4,00	80,00
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	3	Dok	1	Dok	1	Dok	100	1	0	4,00	80,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11	Laporan	4	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100	2	0	6,00	54,55
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	Laporan	4	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100	2	0	6,00	60,00
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	-	1	0	-	-

7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2	Data	0	Data	0	Data	0	Data	-	1	0	-	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	20	73,33	73,33
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1320	Orang/Bulan	518	Orang/Bulan	238	Orang/Bulan	235	Orang/Bulan	99	252, Orang/Bulan	64	817,00	61,89
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10	Laporan	4	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100	2	0	6,00	60,00
7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10	Dokumen	4	Dok	2	Dok	2	Dok	100	2	0	6,00	60,00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	28	Laporan	8	Laporan	6	Laporan	6	Laporan	100	4	0	14,00	50,00
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10	Dokumen	4	Dok	1	Dok	1	Dok	100	2	0	5,00	50,00

7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	0	66,67	66,67
7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dokumen	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	0	2,00	50,00
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10	Laporan	4	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100	2	0	6,00	60,00
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	0	2,00	50,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	100	%			100		100		100	100	0	33,33	33,33
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80	Orang	20	Orang	20	Orang	20	Orang	100	20	0	40,00	50,00
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80	Orang	0	Orang	20	Orang	20	Orang	100	20	0	20,00	25,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	0	66,67	66,67
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	Paket	4	Paket	2	Paket	2	Paket	100	2	0	6,00	60,00

7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	Paket	3	Paket	2	Paket	2	Paket	100	2	0	5,00	50,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	Paket	2	Paket	1	Paket	1	Paket	100	1	0	3,00	60,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang dibeli	0	Jenis	0	Jenis	0	Jenis	0	Jenis	-	0	-	-	-
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	2	Paket	1	Paket	1	Paket	100	1	0	3,00	60,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20	Laporan	8	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100	4	0	12,00	60,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	Laporan	4	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100	2	0	6,00	60,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	0	66,67	66,67
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	Unit	0	unit	0	unit	0	unit	-	1	0	-	-
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	Paket	2	Paket	1	Paket	1	Paket	100	1	0	3,00	60,00
7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	Unit	0	unit	0	unit	0	unit	-	0	-	-	-

7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	0	unit	0	unit	0	unit	-	1	0	-	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	66,66667	88,89	88,89
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	2	Laporan	200	1	0	4,00	80,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	24	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100	12	3	39,00	65,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Laporan	24	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100	12	4	40,00	66,67
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	100	%	100	%	83,34	%	90,95	%	109	84	0	63,65	63,65
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	Unit	4	unit	0	unit	0	unit	-	0		4,00	40,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	Unit	6	unit	6	unit	6	unit	100	4	0	12,00	80,00

7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22	Unit	7	unit	5	unit	5	unit	100	5	0	12,00	54,55
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	2	unit	1	unit	1	unit	100	1	0	3,00	60,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,70	Poin	80,37	Poin	83,34	Poin	87,06	Poin	104	83,59	0	87,06	100,42
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	0	66,67	66,67
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	0	2,00	50,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	0	2,00	50,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan	80	%	100	%	100	%	100	%	100	100	0	66,67	83,33

7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	0	2,00	50,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	2	0	2,00	50,00
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	0	66,67	66,67
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	0	3,00	60,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	50	83,33	83,33
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10	Laporan	4	Laporan	3	Laporan	4	Laporan	133	2	1	9,00	90,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	0	66,67	66,67

7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	80	%	100	%	100	%	100	%	100	100	0	66,67	83,33
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4	Lemba ga Kemasy arakata n	1	Lembaga Kemasyar akatan	1	Lembaga Kemasyara katan	1	Lembaga Kemasyaraka tan	100	1	0	2,00	50,00
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4	Dokum en	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	0	2,00	50,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Lapora n	1	Laporan	1	Laporan	3	Laporan	300	1	0	4,00	100,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	50	83,33	83,33
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5	Lemba ga	2	Lembaga	1	Lembaga	2	Lembaga	200	1	1	5,00	100,00
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	4	Unit	0	unit	0	unit	0	unit	-	0		-	-

7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	1	4,00	80,00
7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	0	2,00	50,00
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100	%	0	%	0	%	0	%	-	100	0	-	-
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	-	50	0	-	-
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	-	50	0	-	-
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	-	50	0	-	-

7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	-	50	0	-	-
7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	100	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	-	50	0	-	-
7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	100	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	-	50	0	-	-
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	0	66,67	66,67
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	80	%	100	%	100	%	100	%	100	100	0	66,67	83,33
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	2	Laporan	200	1	0	3,00	75,00

7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	0	2,00	50,00
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	0	66,67	66,67
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10	Laporan	4	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100	2	0	6,00	60,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	0	66,67	66,67
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	25	75,00	75,00

7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	-	0		1,00	100,00
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80	Orang	110	Orang	400	Orang	400	Orang	100	20	0	510,00	637,50
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	995	Orang	460	Orang	500	Orang	500	Orang	100	150	75	1.035,00	104,02
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	0	2,00	50,00

7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	0	2,00	50,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	0	66,67	66,67
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	37,5	79,17	79,17
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	2	Dokumen	200	1	0	4,00	80,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	49	Dokumen	26	Dokumen	13	Dokumen	13	Dokumen	100	12	3	42,00	85,71
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	-	1	0	1,00	100,00
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6	Dokumen	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	1	5,00	83,33
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	-	0	0	1,00	100,00

7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	0	2,00	50,00
7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	1	3,00	75,00
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	0	2,00	50,00

Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Realisasi Program yang menunjang terhadap kinerja utama dari Tabel TC.29 di atas memberikan gambaran :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada Realisasi Program Kegiatan Tahun 2024 tidak terdapat Program Kegiatan yang tidak memenuhi target, hal ini dikarenakan terjadinya peningkatan kinerja aparatur terhadap capaian target Kinerja, Program dan Kegiatan. Baik dari sisi kinerja maupun penyerapan Anggarannya.

Yang paling menonjol terhadap capaian Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, hal tersebut terjadi dikarenakan adanya perubahan Anggaran akibat dari adanya perubahan APBD TA 2024 yang berakibat terhadap keterlambatan penyerapan, namun demikian meskipun berpengaruh terhadap capaian pelaksanaan program namun secara umum capaian Kinerja masih tetap tercapai meskipun ada kegiatan yang sama sekali tidak dilaksanakan.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Dari sisi penyerapan anggaran Secara keseluruhan Program Kegiatan/Sub Kegiatan telah berjalan sesuai perencanaan dan telah sesuai target program dan Kegiatan (Outcome) maupun Kegiatan sesuai dengan target dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam perencanaan meskipun dalam penggunaan atau penyerapan anggaran terdapat kegiatan yang penyerapannya hanya 50 persen namun dalam capaian kinerjanya mencapai 100%.

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pacet Pengukuran Kinerja Sasaran dan Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs),

keluaran (outputs), hasil (outcomes), Indikator – indikator tersebut merupakan Target dari Capaian Indikator sasaran dan Kegiatan. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas target Capaian dan hasil pengukuran kinerja, Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Pacet sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan – perubahan yang terjadi, sehingga dari Indikator tersebut dapat diukur sejauhmana capaian Kinerja dalam pelaksanaan Program maupun Kegiatan.

Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan, tingkat kesesuaian dalam pelaksanaan dan perencanaan harus terjadi klesesuaian yang akan memudahkan pengukuran capaian Kinerja., sehingga Capaian Kinerja yang diperoleh dari hasil Kerja dan Kinerja Perangkat Daerah merupakan Implementasi dari sebuah perencanaan

Analisis Kinerja dimaksudkan **untuk mengetahui sejauhmana capaian Kinerja terutama pada tahun sebelumnya** untuk memberikan masukan terhadap penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun berikutnya.

Analisis Kinerja Pelayanan di Kecamatan Pacet merupakan hasil yang objektif sesuai dengan hasil pengukuran kinerja tahun sebelumnya sebagaimana tergambar pada tabel TC.30 mengenai Pencapaian Kinerja Pelayanan kecamatan Pac

Tabel 2.3 (T-C. 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan kecamatan Pacet
Kabupaten Bandung

No	Indikator	SPM/Stand ar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Nilai AKIP			68,47	70,52	72,64	74,82	75,70	75,80	80,10		76,50	Dengan adanya Monev Internal pelaksanaan Program kegiatan dan rencana aksi yang dilakukan tiap Triwulan, Capaian Nilai AKIP Tahun 2022 telah melampaui target. Untuk Realisasi Tahun 2023 HASIL Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten bandung ada kenaikan sebesar 0,10 dari tahun sebelumnya.
2	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)			80,10	81,70	83,34	85,00	80,64	80,37	87,06	82	83	Pada TahunTahun 2021 dan 2022 terjadi Capaian Realisasi yang melebihi target sejalan dengan optimalisasi pelayanan melalui Inovasi-Inovasi , sehingga target untuk tahun 2023 sudah tidak relevan namun demikian target masih tetap dikarenakan belumdilakukan perubahan kedua pada Renstra Tahun 2021-2026 , dan untuk target tahun 2023 Tidak tercapai.
3	Persentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik			81,41	82,01	83,66	85,33	95,34	89,49	90,95	92	95	Dengan adanya pendataan dan penertiban aset serta pengadaan pada Tahun 2022 Target Aset dalam keadaan baik realisasi tercapai sesuai target.
4	Persentase Desa yang beradministrasi Baik			60	62	64	66	62	69,23	-	-	-	Capaian Kegiatan Monitoring dan evaluasi terhadap realisasi bantuan keuangan Desa serta pembinaan administrasi Desa, telah berkontribusi terhadap tercapainya realisasi target Desa beradministrasi Baik
	Desa Cepat Berkembang			-	-	-	-	-	-	1	1	1	Capaian Desa yang berubah Status dari Desa Maju kle Desa Mandiri hasil dari Tertib administrasi yang di bina.

Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

1. Kinerja Kecamatan Pacet

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Pacet telah berjalan sesuai dengan Perencanaan meskipun masih terdapat kekurangan, sebagai bagian dari monitoring dan Evaluasi intern telah dilaksanakan Rapat Koordinasi setiap triwulan untuk memastikan capaian Kinerja dan mengatasi atau merumuskan solusi untuk mengatasi kendala dan hambatan sebagai resiko pelaksanaan pelayanan menuju ke arah yang lebih baik.

Hal – hal kritis kaitan dengan pelayanan ;

- a. Melaksanakan pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat Pacet berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bandung No. 137.1/Kep.580.adpem/2018 yang terdiri dari 29 Kewenangan dan 320 Rincian Pelimpahan, dimana dalam pelaksanaannya kewenangan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mandatory dan program Prioritas Bupati Bandung.
- b. Melaksanakan Pelayanan Publik langsung terhadap Masyarakat antara lain :
 1. Perizinan
 2. Non Perizinan (Penerbitan KK, KTP dan Administrasi Kependudukan lainnya)
 3. Melaksanakan Program Kewilayan
 4. Menindaklanjuti laporan dan keluhan Masyarakat kaitan dengan Pelayanan
 5. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat. (SKM) guna mengetahui tingkat Kepuasan Masyarakat nelalui Kusioner SKM Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

2. Permasalahan dan Hambatan

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Camat sebagai Implementasi dari Tugas Kecamatan secara umum tidak terlepas dari adanya kendala dan Hambatan yang merupakan satu kesatuan yang

perlu adanya penanganan untuk memberikan arah kebijakan yang akan diambil guna terlaksananya program kegiatan sesuai dengan target

kinerja maupun target dari pagu anggarannya.

Permasalahan :

- a. Belum optimalnya pelayanan Publik.
- b. Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat (Delegatif);
- c. Belum optimalnya Pelaksanaan Tugas Atributif yang melekat pada Kecamatan

Hambatan :

1. Belum optimalnya Sarana dan Prasarana (perlu perbaikan dan penambahan)
2. Belum optimalnya dukungan anggaran terhadap kebutuhan pelaksanaan Program dan Kegiatan di Kecamatan.

3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Adanya permasalahan dan hambatan yang ada terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sangat berpengaruh, meskipun permasalahan dan hambatan tersebut bisa diatasi dengan melakukan monitoring dan evaluasi intern secara terus menerus dan rutin dilaksanakan setiap bulan dan apabila ada permasalahan dan hambatan, semua aparatur untuk turut membantu dan memberikan pendampingan terhadap permasalahan yang ada, sehingga program kegiatan berjalan sebagaimana mestinya, namun demikian permasalahan dan hambatan tersebut perlu penanganan .

4. Kekuatan, Kelemahan, Tantangan dan Peluang.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak terlepas dari adanya Kekuatan, Kelemahan tantangan dan peluang yang merupakan dinamika yang perlu disikapi untuk memperlancar pelayanan dan dikelola dengan baik agar kelemahan dan tantangan dapat diatasi dengan kekuatan yang dimiliki dan peluang yang ada

A. Kekuatan

- 1) Adanya dukungan anggaran
- 2) SDM Aparatur meskipun masih terdapat kelemahan tetapi secara umum dapat melayani dengan baik
- 3) Sarana dan Parasarana pendukung pelayanan
- 4) sinergitas dan soliditas aparatur

B. Kelemahan

- 1) Sarana dan Prasarana perlu adanya perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana baru
- 2) Kapasitas SDM Aparatur
- 3) Belum optimalnya pembangunan sarana publik yang memadai (RTH)
- 4) Belum adanya penunjang sarana pelayanan publik yaitu Sarana bermain anak yang merupakan saran penunjang pelayanan Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- 5) Pemanfaatan hasil evaluasi dan analisis data dalam perencanaan pembangunan belum optimal;
- 6) Pengumpulan data pembangunan dari unit kerja belum optimal.

C. Tantangan

- 1) Masyarakat menginginkan adanya pelayanan yang cepat, tepat dan akurat
- 2) Sebagian masyarakat masih belum memahami atau belum mengetahui tentang SOP pelayanan
- 3) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan yang sehat dan bersih
- 4) Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dalam perencanaan (Musrenbang)
- 5) Jauhnya jarak pelayanan Pacet – Soreang lhususnya dalam pelayanan Akte Kelahiran dan perizinan yang bukan kewenangan Kecamatan.

D. Peluang

- 1) Antusiasme masyarakat terhadap perencanaan mendukung Kegiatan Musrenbang telah berjalan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
- 2) ketentuan yang berlaku
- 3) Antusiame masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan (KK, KTP, Akte Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak)
- 4) Kordinasi dengan pemerintah Desa masih terjalin dengan baik.

5. Formulasi isu – isu penting

Formulasi isu – isu penting sebagai tindak lanjut dari adanya permasalahan, Tantangan dan peluang merupakan satu kesatuan dan satu rangkaian untuk memberikan catata strategis atau rekomendasi untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun yang direncanakan antara lain :

- 1) Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur dengan mengikut sertakan aparatur pada Bimtek dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemkab.
- 2) Melaksanakan Pembinaan peningkatan kapasitas melalui Sosialisasi Perundang – undangan kaitan dengan Tugas dan Fungsi Aparatur.
- 3) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi capaian kinerja intern secara rutin, terus menerus dan berkesinambungan.
- 4) Penyusunan SOP secara lengkap untuk tiap bidang dan sub bidang.
- 5) Melaksanakan sosialisasi pelayanan publik di kecamatan terutama masalah administrasi Kependudukan.
- 6) Meningkatkan pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan urusan pemerintahan dari bupati secara terukur dan sesuai ketentuan.
- 7) Memfasilitasi adanya pelayanan terpadu yang melayani Pembuatan KTP, KK, Perizinan, Perpustakaan dan pelayan terpadu tersebut Dinas terkait yang memberikan layanan publik hadir langsung melayani di Kecamatan.

Review terhadap Renja RKPD**1. Perbandingan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan**

Membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dilaksanakan agar pada penyusunan Rencana awal Rencana Kerja Tahun yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan.

Tim Penyusun Renja di Tingkat Kecamatan melakukan inventarisasi kebutuhan berdasarkan permasalahan yang ada yang menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan.

Melakukan Koordinasi untuk merumuskan perencanaan Tahun berikutnya dengan acuan rancangan awal RKPD dan melakukan penelaahan terhadap Permasalahan yang ada dan merupakan Prioritas untuk dilaksanakan, terdapat beberapa perbedaan terutama pada pagu indikatif antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Tabel 2.4
REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

Kode					Rancangan Awal RKPD tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					selisih		
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian Kinerja		Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)
7	1	0	0	0	KECAMATAN					6.248.806.075,00	KECAMATAN					6.331.770.186,56	
7	1	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Pacet	Nilai AKIP	80,5	Poin	5.037.806.075,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Pacet	Nilai AKIP	80,5	Poin	5.389.574.095,56	351.768.020,56
7	1	1	2	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Pacet	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100	%	25.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Pacet	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100	%	23.565.600,00	1.434.400,00
7	1	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Pacet	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	1.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Pacet	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	850.000,00	-150.000,00
7	1	1	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Pacet	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Pacet	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	850.000,00	-150.000,00
7	1	1	2	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Pacet	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	2.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Pacet	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1.870.000,00	-130.000,00

7	1	1	2	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Pacet	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Pacet	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	850.000,00	-150.000,00
7	1	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Pacet	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	2.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Pacet	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1.870.000,00	-130.000,00
7	1	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Pacet	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	1.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Pacet	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	850.000,00	-150.000,00
7	1	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Pacet	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	1.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Pacet	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	850.000,00	-150.000,00
7	1	1	2	8	penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	Kec. Pacet	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	1.000.000,00	penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	Kec. Pacet	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	680.000,00	-320.000,00
7	1	1	2	9	pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah	Kec. Pacet	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	Data	15.000.000,00	pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah	Kec. Pacet	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	Data	14.895.600,00	-104.400,00
7	1	1	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Pacet	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100	%	4.253.806.075,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Pacet	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100	%	4.577.421.967,56	323.615.892,56
7	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pacet	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	252	Orang / Bulan	4.247.806.075,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pacet	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	252	Orang/ Bulan	4.573.551.967,56	325.745.892,56
7	1	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Pacet	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	2.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Pacet	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	1.660.000,00	-340.000,00

7	1	1	2	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kec. Pacet	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	Dokumen	1.000.000,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kec. Pacet	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	Dokumen	510.000,00	-490.000,00
7	1	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Pacet	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Laporan	2.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Pacet	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Laporan	1.360.000,00	-640.000,00
7	1	1	2	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Pacet	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Dokumen	1.000.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Pacet	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Dokumen	340.000,00	-660.000,00
7	1	1	2	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Pacet	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan	100	%	3.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Pacet	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan	100	%	2.210.000,00	-790.000,00
7	1	1	2	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Pacet	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	1.000.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Pacet	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	510.000,00	-490.000,00
7	1	1	2	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Pacet	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	1.000.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Pacet	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	850.000,00	-150.000,00
7	1	1	2	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Pacet	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1.000.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Pacet	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	850.000,00	-150.000,00
7	1	1	2	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Pacet	Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	100	%	4.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Pacet	Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	100	%	3.846.600,00	-153.400,00
7	1	1	2	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Pacet	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20	Orang	2.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Pacet	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20	Orang	1.923.300,00	-76.700,00

7	1	1	2	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Pacet	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	Orang	2.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Pacet	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	Orang	1.923.300,00	-76.700,00
7	1	1	2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Pacet	Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100	%	140.500.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Pacet	Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100	%	124.749.450,00	-15.750.550,00
7	1	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Pacet	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	10.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Pacet	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	10.000.000,00	0,00
7	1	1	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Pacet	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	20.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Pacet	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	20.000.000,00	0,00
7	1	1	2	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Pacet	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	15.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Pacet	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	15.000.000,00	0,00
7	1	1	2	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Pacet	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.500.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Pacet	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.500.000,00	0,00
7	1	1	2	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Pacet	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	Laporan	7.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Pacet	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	Laporan	7.000.000,00	0,00
7	1	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Pacet	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Laporan	86.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Pacet	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Laporan	70.249.450,00	-15.750.550,00
7	1	1	2	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Pacet	Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	88.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Pacet	Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	90.421.900,00	2.421.900,00
7	1	1	2	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Pacet	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	36.855.900,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Pacet	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	27.417.000,00	-9.438.900,00
7	1	1	2	5	Pengadaan Mebel	Kec. Pacet	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Unit	10.000.000,00	Pengadaan Mebel	Kec. Pacet	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Unit	21.860.800,00	11.860.800,00

7	1	1	2	1	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Pacet	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	41.144.100,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Pacet	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	41.144.100,00	0,00
7	1	1	2	0	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Pacet	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	293.500.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Pacet	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	337.500.000,00	44.000.000,00
7	1	1	2	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Pacet	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	2.500.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Pacet	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	2.500.000,00	0,00
7	1	1	2	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Pacet	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	35.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Pacet	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	35.000.000,00	0,00
7	1	1	2	4	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Pacet	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	256.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Pacet	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	300.000.000,00	44.000.000,00
7	1	1	2	0	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Pacet	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	84	%	230.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Pacet	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	84	%	229.858.578,00	-141.422,00
7	1	1	2	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Pacet	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	58.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Pacet	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	58.000.000,00	0,00
7	1	1	2	6	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Pacet	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	5.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Pacet	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	4.858.578,00	-141.422,00
7	1	1	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Pacet	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	167.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Pacet	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	167.000.000,00	0,00
						Jumlah 1	Kec. Pacet				5.037.806.075,00	Jumlah 1	Kec. Pacet				5.389.574.095,56	351.768.020,56

7	1	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Pacet	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,59	Poin	520.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Pacet	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,59	Poin	362.655.400,00	157.344.600,00
7	1	2	2	0	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Pacet	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	%	50.000.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Pacet	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	%	20.182.900,00	29.817.100,00
7	1	2	2	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Pacet	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan	25.000.000,00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Pacet	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan	7.816.300,00	17.183.700,00
7	1	2	2	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Pacet	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Dokumen	25.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Pacet	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Dokumen	12.366.600,00	12.633.400,00
7	1	2	2	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Pacet	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan	100	%	55.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Pacet	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan	100	%	77.289.200,00	22.289.200,00
7	1	2	2	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Pacet	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	25.000.000,00	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Pacet	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	12.366.600,00	12.633.400,00
7	1	2	2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Pacet	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	30.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Pacet	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	64.922.600,00	34.922.600,00

7	1	2	2	0	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Pacet	Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	100	%	25.000.000,00	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Pacet	Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	100	%	20.892.900,00	4.107.100,00	-
7	1	2	2	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Pacet	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1	Dokumen	25.000.000,00	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Pacet	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1	Dokumen	20.892.900,00	4.107.100,00	-
7	1	2	2	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Pacet	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	%	390.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Pacet	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	%	244.290.400,00	145.709.600,00	-
7	1	2	2	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Pacet	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2	Laporan	390.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Pacet	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2	Laporan	244.290.400,00	145.709.600,00	-
7	1	3	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Pacet	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	100	%	290.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Pacet	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	100	%	232.699.791,00	57.300.209,00	-
7	1	3	2	0	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Pacet	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	%	80.000.000,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Pacet	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	%	57.371.200,00	22.628.800,00	-
7	1	3	2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Pacet	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1	Lemba ga Kema syara katan	25.000.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Pacet	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1	Lemba ga Kema syarak atan	12.366.600,00	12.633.400,00	-

7	1	3	2	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Pacet	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1	Dokumen	20.000.000,00	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Pacet	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1	Dokumen	10.051.700,00	9.948.300,00	-0
7	1	3	2	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Pacet	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	35.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Pacet	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	34.952.900,00	-47.100,00	
7	1	3	2	0	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa)	Kec. Pacet	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi	100	%	80.000.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa)	Kec. Pacet	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi	100	%	66.265.700,00	13.734.300,00	-00
7	1	3	2	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Pacet	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Pacet	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga Kemasyarakatan	24.721.200,00	-278.800,00	
7	1	3	2	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Pacet	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	Laporan	30.000.000,00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Pacet	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	Laporan	24.913.900,00	5.086.100,00	-0
7	1	3	2	5	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kec. Pacet	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	Laporan	25.000.000,00	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kec. Pacet	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	Laporan	16.630.600,00	8.369.400,00	-0
7	1	3	2	0	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Pacet	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100	##### ###	130.000.000,00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Pacet	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100	100,00 %	109.062.891,00	20.937.109,00	-00

7	1	3	2	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kec. Pacet	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50	Keluarga	20.000.000,00	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kec. Pacet	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50	Keluarga	9.952.600,00	- 10.047.400,00
7	1	3	2	5	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kec. Pacet	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50	Keluarga	20.000.000,00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kec. Pacet	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50	Keluarga	19.905.200,00	-94.800,00
7	1	3	2	8	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan perilaku bersih dan sehat	Kec. Pacet	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50	Keluarga	20.000.000,00	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan perilaku bersih dan sehat	Kec. Pacet	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50	Keluarga	19.263.291,00	-736.709,00
7	1	3	2	9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kec. Pacet	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50	Keluarga	20.000.000,00	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kec. Pacet	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50	Keluarga	9.952.600,00	- 10.047.400,00
7	1	3	2	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kec. Pacet	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50	Keluarga	25.000.000,00	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kec. Pacet	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50	Keluarga	24.994.600,00	-5.400,00
7	1	3	2	11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kec. Pacet	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	50	Keluarga	25.000.000,00	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kec. Pacet	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	50	Keluarga	24.994.600,00	-5.400,00
7	1	4	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Pacet	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100	%	120.000.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Pacet	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100	%	108.467.200,00	- 11.532.800,00

7	1	4	2		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Pacet	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	%	80.000.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Pacet	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	%	70.677.200,00	9.322.800,00	-0
7	1	4	2	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Pacet	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	40.000.000,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Pacet	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	30.677.200,00	9.322.800,00	-0
7	1	4	2	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Pacet	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	40.000.000,00	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Pacet	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	40.000.000,00		0,00
7	1	4	2	0	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Pacet	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	%	40.000.000,00	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Pacet	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	%	37.790.000,00	2.210.000,00	-0
7	1	4	2	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Pacet	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2	Laporan	40.000.000,00	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Pacet	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2	Laporan	37.790.000,00	2.210.000,00	-0
7	1	5	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Pacet	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100	%	135.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Pacet	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100	%	131.653.800,00	3.346.200,00	-0

7	1	5	2	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Pacet	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	%	135.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Pacet	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	%	131.653.800,00	-3.346.200,00
7	1	5	2	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Pacet	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20	Orang	45.000.000,00	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Pacet	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20	Orang	47.700.000,00	2.700.000,00
7	1	5	2	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Pacet	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	150	Orang	55.000.000,00	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Pacet	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	150	Orang	49.928.500,00	5.071.500,00
7	1	5	2	5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Pacet	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1	Laporan	10.000.000,00	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Pacet	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1	Laporan	9.025.300,00	-974.700,00
7	1	5	2	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Pacet	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	Dokumen	25.000.000,00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Pacet	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	Dokumen	25.000.000,00	0,00
7	1	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Pacet	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100	%	146.000.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Pacet	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100	%	106.719.900,00	39.280.100,00
7	1	6	2	0	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Pacet	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100	%	146.000.000,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Pacet	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100	%	106.719.900,00	39.280.100,00

7	1	6	2	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Pacet	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Dokumen	15.000.000,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Pacet	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Dokumen	7.463.300,00	- 7.536.700,00	
7	1	6	2	3	Fasailitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Kec. Pacet	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	Dokumen	36.000.000,00	Fasailitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Kec. Pacet	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	Dokumen	17.908.600,00	- 18.091.400,00	
7	1	6	2	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Pacet	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1	Dokumen	0,00	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Pacet	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1	Dokumen	0,00	0,00	
7	1	6	2	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Pacet	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1	Dokumen	35.000.000,00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Pacet	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1	Dokumen	34.900.500,00	-99.500,00	
7	1	6	2	14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kec. Pacet	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1	Dokumen	20.000.000,00	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kec. Pacet	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1	Dokumen	9.948.300,00	- 10.051.700,00	
7	1	6	2	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec. Pacet	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	Dokumen	20.000.000,00	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec. Pacet	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	Dokumen	16.602.600,00	- 3.397.400,00	
7	1	6	2	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec. Pacet	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	20.000.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec. Pacet	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	19.896.600,00	-103.400,00	
					Jumlah 2					1.211.000.000,00	Jumlah 2					942.196.091,00	- 268.803.909,00	
					Jumlah Total					6.248.806.075,00	Jumlah Total						6.331.770.186,56	82.964.111,56

2. Alasan Pelaksanaan analisis kebutuhan

Untuk menjamin agar perencanaan sesuai dengan permasalahan yang ada maka perlu dilakukannya analisis kebutuhan dari berbagai bidang secara keseluruhan disesuaikan dengan kemampuan keuangan sebagaimana pagu yang telah ada.

Harapannya tentu dalam pelaksanaannya tidak terjadi pengadaan atau pelaksanaan kegiatan diluar kebutuhan.

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kegiatan Musrenbang merupakan hasil dari sebuah perencanaan yang tertuang dalam rencana kerja kecamatan dan menghasilkan dokumen usulan yang merupakan hasil kinerja dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Sesuai dengan Perundang – undangan bahwa usulan Program Kegiatan berbasis partisipatif yang mengutamakan usulan – usulan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan di wilayah Desa melalui Musrenbang Desa yang melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan di Desa, dan usulan tersebut menjadi prioritas Pembangunan di Desa yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan.

Musrenbang Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan melibatkan seluruh perwakilan dari Desa dan pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan, dan usulan tersebut terbagi dalam bidang – bidang yaitu Bidang Sosial.Budaya, Bidang Ekonomi, dan Bidang Infrastruktur.

Dari hasil Musrenbang tersebut didokumentasikan oleh Tim Musrenbang Kecamatan ke dalam Daftar Skala Prioritas Kecamatan untuk diusulkan pada Musrenbang di tingkat Kabupaten

Tingkat kesesuaian usulan dari Desa yang diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan, secara keseluruhan 60% sesuai dengan isu – isu penting penyelenggaraan Tupoksi Perangkat Daerah, namun demikian karena dibatasi kuota Pagu anggaran Kecamatan usulan tersebut tidak terakomodir secara keseluruhan. Dan secara umum penyelenggaraan musrenbang di tingkat Kecamatan telah memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Desa dan Kecamatan.

Daftar skala Prioritas Kecamatan untuk di Desa – Desa yang disetujui masuk dalam RKP OPD/Dinas terkait dan RKPD Kabupaten Bandung dan untuk Program kegiatan di Kecamatan diolah melalui Renstra yang terbagi dalam Urusan Rutin dan Kewilayahan

Adapun hasil kinerja yang merupakan output dan outcome dari program perencanaan Daerah dengan Kegiatan Musrenbang adalah tingkat usulan yang disetujui oleh Dinas Teknis terkait.

Adapaun usulan Musrenbang Tahun 2025 sampai saat ini masih dalam proses penginputan di tingkat Desa dan menunggu kegiatan musrenbang tingkat Kecamatan/Kabupaten.

- 1. Usulan dalam Daftar Skala Prioritas berjumlah** : - **Usulan**
- 2. Usulan Yang telah disetujui dalam forum PD** : - **Usulan**

Usulan tersebut dipilah tidak masuk pada Renstra dan Renja tetapi usulan dari Desa di olah melalui Musyawarah Pembangunan di Kecamatan dan disulkan melalui Dinas dan Badan untuk disetujui masuk dalam Renja Dinas/Badan atau tidak dibiayai dari DPA Kecamatan sehingga dipilah masuk dalam Renja Dinas/badan untuk masuk dalam RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025, dan usulan tersebut berdasarkan masalah Daerah Kabupaten yang ada di Desa desa di Kecamatan Pacet.

Tabel 2.5 (T-C.32)
 DAFTAR SKALA PRIORITAS (DSP)
 KECAMATAN PACET UNTUK USULAN DESA REGULER DAN KOMPETITIP
 TAHUN 2025

No	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kelurahan	Status

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Bandung dalam rangka memberikan kontribusi terhadap standart penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik pada penyelenggaran Pemerintahan, baik Pusat dan Daerah.

Peranan Kecamatan sangat Strategis, yaitu OPD yang menerapkan kebijakan dalam upaya mengoptimalkan Pelaksanaan Tugas dan penyelenggaraan fungsi sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan;

Tabel 3.1**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Visi Kabupaten Bandung : Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera (BEDAS) Maju, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas			
Misi ke 3 Mengoptimalkan tata kelola pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Kinerja Kelembagaan Dalam Pelayanan Publik yang Baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kualitas SDM Pemerintah. 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3. Terwujudnya Sistem Birokrasi yang Transparan dan Dapat Dipertanggungjawabkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Meritokrasi ASN. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan karier ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward dan punishment, serta melalui peningkatan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja 2. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM ASN
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital dan tata kelola satu data melalui peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintahan (TIK) di sektor pemerintahan

			<ul style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan infrastruktur IT untuk layanan pemerintahan dengan skema pembiayaan yang inovatif. 3. Peningkatan infrastruktur IT untuk layanan pemerintahan dengan skema pembiayaan yang inovatif. 4. Penguatan kelembagaan dan regulasi sistem riset dan inovasi daerah.
		5. Pemantapan Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengendalian pembangunan daerah melalui penerapan Manajemen Risiko, Efektivitas pengendalian korupsi dan peningkatan kapabilitas APIP. 2. Penataan proses bisnis dan SOP pelayanan publik, serta peningkatan keterbukaan informasi

Dengan Visi **“Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera (Bedas) Maju, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”**. Kecamatan Pacet harus berkontribusi terhadap tercapainya Visi tersebut dengan mengemban Tugas Misi No 3 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Tranparan dan Akuntabel.

Kecamatan Pacet sebagai bagian dari Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung dalam melaksanakan kebijakannya tidak terlepas dari Renstra dan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dengan Sasaran RPJMD Kabupatenm Bandung Tahun 2025 – 2029 Meningkatnya kualitas e-goverment melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur, tata kelola pemerintahan, dan penyelenggaraan pelayanan publik dengan arah Kebijakan Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur serta mengoptimalkan sistem pelayanan publik.

Guna mensukseskan kebijakan sebagaimana dalam RPJMD, selain melaksanakan Kegiatan yang bersipat Atributif dan Delegatif sebagai pemegang mandatori Kewenangan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati Kepada Camat, selain membawa Misi No 3. Kecamatan Pacet harus memberikan kontribusi terhadap capaian misi lainnya dengan melaksanakan kegiatan yang bersifat mendorong atau memfasilitasi, mengkoordinasikan aspek kewilayahan untuk mendukung Dinas/Instansi lain dalam menjalan Program Kegiatan di wsilayah Kecamatan Pacet.

Fasilitasi dan Koordinasi terutama terhadap bidang Pendidikan, Kesehatan dan Program Pembangunan lainnya dengan tujuan mendorong terhadap capaian IPM Kecamatan Pacet guna berkontribusi capaian IPM Kabupaten Bandung Untuk menmendukung terhadap Kinerja pelayananam Publik, Kecamatan dituntut untuk melakukan Inovasi diberbagai bidang terutama sesuai dengan tugas dan fungsinya agar layanan publik dapat berjalan secara efektif dan epesien.

3.2 .Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi Kabupaten Bandung, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah, sehingga Tujuan merupakan hal yang sangat Penting dalam perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya terdapat arah yang jelas dan terukur serta memberikan parameter terhadap capaian Kinerja Perangkat Daerah.

3.3 Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Dalam upaya memberikan kontribusi terhadap capaian Visi dan Misi, OPD Kecamatan secara bersama melaksanakan Misi dari Kabupaten Bandung dan kaitan dengan misi tersebut Kecamatan Pacet melaksanakan Program dan Kegiatan dengan Tujuan dan Sasaran yang berkorelasi dan berorientasi pada Visi dan Misi Kabupaten Bandung sebagai kekuatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpegang pada ketentuan perundang – undangan sebagai Pelaksanaan tugas Atributif dan Delegatif sebagai kewenangan mandatori dari Bupati Kepada Camat. sebagaimana Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep. 615 -KASOTDA/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat, dengan jenis Pelimpahan antara lain : Rekomendasi, Koordinasi, Pengendalian, fasilitasi, Penyelenggaraan, dan Perizinan

A. Tujuan

Tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Pacet dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan adalah :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Dengan Tujuan tersebut Kecamatan Pacet sebagai bagian dari Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya dituntut harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan roda pemerintahan di tingkat Kecamatan diwujudkan dengan Akuntabilitas melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang diwujudkan adanya komitmen seluruh jajaran di Kecamatan untuk berkinerja dengan baik dengan Perjanjian Kinerja,

dan untuk mengevaluasi terhadap kinerja aparaturnya tersebut perlu dilakukan pengukuran Kinerja dengan acuan target capaian Kinerja sebagaimana Perencanaan dalam Renstra dan Renja.

Tata kelola pemerintahan sebagaimana Tujuannya harus dapat dilaporkan Kinerjanya melalui LKIP yang harus disusun setiap tahun dengan data yang bersumber dari hasil kinerja masing – masing unit kerja yang ada di kecamatan.

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan layanan Publik di Kecamatan adalah merupakan hal yang harus disikapi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Selain Layanan Publik berupa Kegiatan Pelayanan Publik Paten guna pelayanan Administrasi yang dibutuhkan Masyarakat, Kecamatan harus melaksanakan Program dan Kegiatan guna peningkatan melalui Peningkatan pelaksanaan Program dan Kegiatan serta melakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa agar Pelaksanaan Tata kelola pemerintahan Desa dalam melaksanakan Pembangunan dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Guna terwujudnya pelayanan yang baik, Kecamatan Pacet dengan Visi Pelayanan : Terwujudnya Pelayanan yang Cepat, Efektif, Responsif, Dinamis, Akurat, dan Santun, ditunjang dengan Misi Pelayanan .

1. Mewujudkan Pelayanan Cepat (sesuai dengan SOP)
2. Meningkatkan Pelayanan yang efektif (Selesai sesuai Ketentuan)
3. Meningkatkan Pelayanan yang Responsif
4. Meningkatkan Pelayanan yang Dinamis (Tanggap dan cepat terhadap kondisi yang ada)
5. Meningkatkan Pelayanan yang Akurat
6. Mewujudkan Aparatur yang santun dalam melayani

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Sasaran – sasaran tersebut dilaksanakan setiap tahun melalui Rencana Kerja sebagai penjabaran dari Rencana Strategis. Adapun Sasaran Renja Kecamatan Pacet :

1. Meningkatnya Kualitas kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik dan tata kelola pemerintahan
3. Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa

Untuk mencapai Sasaran tersebut Camat Pacet telah mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi dan Monitoring evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dengan Monitoring dan Evaluasi internal tersebut diharapkan Kinerja Kecamatan Pacet dapat terkoordinasi dengan baik dan berjalan sesuai dengan perencanaan guna pencapaian Target Kinerja dan Pengelolaan Keuangan yang dalam Penyerapannya dapat secara maksimal dan optimal dalam pelaksanaan Program dan Keingatannya.

Selain Monitoring dan Evaluasi Internal, Camat Pacet telah melakukan upaya penegakan Disiplin aparatur dan terus meningkatkan koordinasi guna membangun soliditas Kinerja Pembangunan di kecamatan Pacet.

Tabel 3.2
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PACET TAHUN 2025

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas kinerja Aparatur dan Penyelenggaran Pelayan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP			
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	meningkatkan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang transparan dan akuntabel	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu		
1.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	meningkatkan kualitas Dokumen Perencanaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
1.1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
1.1.3	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
1.1.4	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	meningkatkan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	

						dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
1.1.5	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Terlaksana Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
1.1.6	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Terlaksana Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
1.1.7	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Terlaksana Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu		
1.2.1 1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Terlaksana Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
1.2.1 2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Terlaksana Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
1.2.1 3	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Terlaksana Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Jumlah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
1.2.1 4	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Terlaksana Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	

1.2.1 5	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Terlaksanya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Jumlah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
1.2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Daerah				Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Daerah		
1.2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Terlaksanya Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
1.2.2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
1.3	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Meningkatkan tata kelola Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu		
1.3.1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	meningkatnya Kapasitas SDM dan Disiplin Aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
1.4	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	meningkatnya tata kelola Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal		
1.4.1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Terlaksanya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	

1.4.2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Terlaksanya Meningkatnya Ketersediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
1.4.3	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
1.4.4	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
1.4.5	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakanjumlah surat kabar dan tabloit	
1.4.6	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	
1.4.7	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
1.5	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
1.5.1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
1.5.2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel			Jumlah Pengadaan Mebel	

1.5.3	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
1.6	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1.6.1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
1.6.2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Orang bekerja/Bulan	
1.6.3	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
1.7	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD dalam Kondisi Baik		
1.7.1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

1.7.2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya asa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
1.7.3	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Terlaksanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
1.7.4	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Terlaksanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)			
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		
2.1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	

2.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan		
2.2.5 0	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Menungkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Jenis Urusan
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dibina			
3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi		
3.2.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	
3.2.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Trantiibum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan			

				ketenteraman dan ketertiban umum			
4.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
4.1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian Keberhasilan Pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah			
5.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		

5.1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
5.1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			Jumlah Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
6	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi			
6.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	meningkatnya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		persentase desa yang dibina		

6.1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
6.1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
6.1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.			Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.	
6.1.4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya dan meningkatnya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
6.1.5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Fasiliasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasiliasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Fasiliasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	

Tabel 3.3**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pacet Tahun 2025**

No	Tujuan	Sasaran	Tujuan/Sasaran Indikator	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1. Nilai AKIP	80,40
			2. BMD dalam Keadaan baik	90,95 %
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik dan tatakelola pemerintahan	Nilai IKM	87,06
		2.Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	Desa Cepat berkembang	1 Desa

3.1 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, hendaknya memperhatikan Misi dan visi Kabupaten Bandung dengan ke 3, yaitu: **Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera (BEDAS) Maju, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas.** dengan gerakan Sabilulungan sebagai semangat bergotong royong menguatkan sinergitas instansi Pemerintahan di Kabupaten Bandung.

Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Pacet dalam Perubahan Tahun 2025.

Tabel 3.4**Program dan Kegiatan Tahun 2025**

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
KECAMATAN		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
		Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Fasilitasi Kunjungan Tamu

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pengadaan Mebel
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa)	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
		Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	

		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
		Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan

		Batas Desa
		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Kesesuaian Rencana Awal dengan hasil analisis Kebutuhan terdapat penyesuaian mengingat pada saat penyusunan Ranwal belum dilakukan analisis kebutuhan, namun secara umum telah sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi.

Sebagai acuan dan gambaran mengenai Perencanaan Tahun 2026 dengan target capaian yang harus menjadi acuan bagi aparaturnya Kecamatan Pacet dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel 3.2 adalah merupakan suatu agenda Kerja Pemerintah Kecamatan Pacet pada Tahun 2026 yang tentunya harus disusun pula pengendalian terhadap berbagai resiko yang akan muncul dalam pelaksanaan Program dan kegiatan, sehingga Camat beserta jajaran struktural sampai pada tingkat Staf harus melakukan sebuah perjanjian Kinerja guna menjamin pelaksanaan program dan kegiatan berjalan lancar.

Tabel 3.5 (T-C.33)
Rumusan Rencana Ahir Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Bandung

OPD : Kecamatan Pacet

Kode	URAIAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Ahir Tahun				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
		Sebelum Perubahan	Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
7	1 0 0 0	KECAMATAN			6.331.770.186,56	Apbd Kab		5.128.488.000		
7	1 1 0 0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Kec.Pacet	80,5 Poin	5.389.574.095,56	Apbd Kab	80.40	4.712.988.000	Kab. Bandung
7	1 1 2 0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Kec.Pacet	100 %	23.565.600,00	Apbd Kab	100	24.000.000,00	Kab. Bandung
7	1 1 2 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Pacet	1 Dokumen	850.000,00	Apbd Kab	5	1.000.000,00	Kab. Bandung
7	1 1 2 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec.Pacet	1 Dokumen	850.000,00	Apbd Kab	2	1.000.000,00	Kab. Bandung

7	1	1	2	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec.Pacet	1	Dokumen	1.870.000,00	Apbd Kab	1	2.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	1	2	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec.Pacet	1	Dokumen	850.000,00	Apbd Kab	3	1.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec.Pacet	1	Dokumen	1.870.000,00	Apbd Kab	1	2.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Pacet	2	Laporan	850.000,00	Apbd Kab	4	1.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Pacet	2	Laporan	850.000,00	Apbd Kab	2	1.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	1	2	8	penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kec.Pacet	1	Dokumen	680.000,00	Apbd Kab	1	5.000.000,00	Kab. Bandung

7	1	1	2	9	pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kec.Pacet	1	Data	14.895.600,00	Apbd Kab	1	10.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	1	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Kec.Pacet	100	%	4.577.421.967,56	Apbd Kab	100	4.012.825.000,00	Kab. Bandung
7	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Pacet	252	Orang/ Bulan	4.573.551.967,56	Apbd Kab	252	4.006.825.000,00	Kab. Bandung
7	1	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec.Pacet	2	Laporan	1.660.000,00	Apbd Kab	2	2.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	1	2	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kec.Pacet	2	Dokumen	510.000,00	Apbd Kab	2	1.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec.Pacet	4	Laporan	1.360.000,00	Apbd Kab	4	2.000.000,00	Kab. Bandung

7	1	1	2	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec.Pacet	2	Dokumen	340.000,00	Apbd Kab	200%	1.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	1	2	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan	Kec.Pacet	100	%	2.210.000,00	Apbd Kab	100	3.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	1	2	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec.Pacet	1	Dokumen	510.000,00	Apbd Kab	1	1.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	1	2	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec.Pacet	2	Laporan	850.000,00	Apbd Kab	2	1.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	1	2	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec.Pacet	1	Laporan	850.000,00	Apbd Kab	1	1.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	1	2	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	Kec.Pacet	100	%	3.846.600,00	Apbd Kab	100	5.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	1	2	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec.Pacet	20	Orang	1.923.300,00	Apbd Kab	20	2.500.000,00	Kab. Bandung

7	1	1	2	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec.Pacet	20	Orang	1.923.300,00	Apbd Kab	20	2.500.000,00	Kab. Bandung
7	1	1	2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Kec.Pacet	100	%	124.749.450,00	Apbd Kab	100	179.772.500,00	Kab. Bandung
7	1	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec.Pacet	2	Paket	10.000.000,00	Apbd Kab	2	8.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	1	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec.Pacet	2	Paket	20.000.000,00	Apbd Kab	2	35.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	1	2	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec.Pacet	1	Paket	15.000.000,00	Apbd Kab	1	13.500.000,00	Kab. Bandung
7	1	1	2	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec.Pacet	1	Paket	2.500.000,00	Apbd Kab	100%	2.500.000,00	Kab. Bandung
7	1	1	2	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec.Pacet	4	Laporan	7.000.000,00	Apbd Kab	4	20.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Pacet	2	Laporan	70.249.450,00	Apbd Kab	2	100.772.500,00	Kab. Bandung

7	1	1	2	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec.Pacet	100	%	90.421.900,00	Apbd Kab	100	46.890.500,00	Kab. Bandung
7	1	1	2	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kec.Pacet	1	Unit	27.417.000,00	Apbd Kab	1	30.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	1	2	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec.Pacet	1	Unit	21.860.800,00	Apbd Kab	100%	16.890.500,00	Kab. Bandung
7	1	1	2	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec.Pacet	1	Unit	41.144.100,00	Apbd Kab	1		Kab. Bandung
7	1	1	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Pacet	100	%	337.500.000,00	Apbd Kab	100	368.500.000,00	Kab. Bandung
7	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec.Pacet	1	Laporan	2.500.000,00	Apbd Kab	1	2.500.000,00	Kab. Bandung
7	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec.Pacet	12	Laporan	35.000.000,00	Apbd Kab	12	45.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec.Pacet	12	Laporan	300.000.000,00	Apbd Kab	1200%	321.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	1	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Kec.Pacet	84	%	229.858.578,00	Apbd Kab	90.95	73.000.000,00	Kab. Bandung

7	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec.Pacet	4	Unit	58.000.000,00	Apbd Kab	4	58.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec.Pacet	5	Unit	4.858.578,00	Apbd Kab	5	5.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec.Pacet	1	Unit	167.000.000,00	Apbd Kab	1	10.000.000,00	Kab. Bandung
					Jumlah 1		Kec.Pacet			5.389.574.095,56	Apbd Kab		4.712.988.000	
7	1	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kec.Pacet	83,6	Poin	362.655.400,00	Apbd Kab	87.06	136.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	2	2	0	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec.Pacet	100	%	20.182.900,00	Apbd Kab	100	13.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	2	2	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec.Pacet	1	Laporan	7.816.300,00	Apbd Kab	1	6.500.000,00	Kab. Bandung
7	1	2	2	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec.Pacet	1	Dokumen	12.366.600,00	Apbd Kab	1	6.500.000,00	Kab. Bandung

7	1	2	2	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan	Kec.Pacet	100	%	77.289.200,00	Apbd Kab	100	13.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	2	2	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec.Pacet	1	Laporan	12.366.600,00	Apbd Kab	1	6.500.000,00	Kab. Bandung
7	1	2	2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Pacet	2	Laporan	64.922.600,00	Apbd Kab	1	6.500.000,00	Kab. Bandung
7	1	2	2	0	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kec.Pacet	100	%	20.892.900,00	Apbd Kab	100	10.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	2	2	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec.Pacet	1	Dokumen	20.892.900,00	Apbd Kab	1	10.000.000,00	Kab. Bandung

7	1	2	2	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec.Pacet	100	%	244.290.400,00	Apbd Kab	100	100.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	2	2	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec.Pacet	2	Laporan	244.290.400,00	Apbd Kab	2	100.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	3	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec.Pacet	100	%	232.699.791,00	Apbd Kab	100%	93.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	3	2	0	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec.Pacet	100	%	57.371.200,00	Apbd Kab	100%	33.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	3	2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec.Pacet	1	Lembaga Kemasyarakatan	12.366.600,00	Apbd Kab	1	6.500.000,00	Kab. Bandung
7	1	3	2	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec.Pacet	1	Dokumen	10.051.700,00	Apbd Kab	1	6.500.000,00	Kab. Bandung

7	1	3	2	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Pacet	1	Laporan	34.952.900,00	Apbd Kab	1	20.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	3	2	0	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi	Kec.Pacet	100	%	66.265.700,00	Apbd Kab	100	30.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	3	2	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kec.Pacet	1	Lembaga Kemasyarakatan	24.721.200,00	Apbd Kab	1	10.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	3	2	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec.Pacet	1	Laporan	24.913.900,00	Apbd Kab	1	10.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	3	2	5	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kec.Pacet	1	Laporan	16.630.600,00	Apbd Kab	1	10.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	3	2	0	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec.Pacet	100	%	109.062.891,00	Apbd Kab	100	30.000.000,00	Kab. Bandung

7	1	3	2	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kec.Pacet	50	Keluarga	9.952.600,00	Apbd Kab	5000%	5.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	3	2	5	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kec.Pacet	50	Keluarga	19.905.200,00	Apbd Kab	50	5.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	3	2	8	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan perilaku bersih dan sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kec.Pacet	50	Keluarga	19.263.291,00	Apbd Kab	50	5.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	3	2	9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kec.Pacet	50	Keluarga	9.952.600,00	Apbd Kab	50	5.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	3	2	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kec.Pacet	50	Keluarga	24.994.600,00	Apbd Kab	50	5.000.000,00	Kab. Bandung

7	1	3	2	11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kec.Pacet	50	Keluarga	24.994.600,00	Apbd Kab	50	5.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	4	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Kec.Pacet	100	%	108.467.200,00	Apbd Kab	100	30.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	4	2		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Pacet	100	%	70.677.200,00	Apbd Kab	100	20.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	4	2	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec.Pacet	1	Laporan	30.677.200,00	Apbd Kab	100%	10.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	4	2	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec.Pacet	1	Laporan	40.000.000,00	Apbd Kab	1	10.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	4	2	0	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec.Pacet	100	%	37.790.000,00	Apbd Kab	100	10.000.000,00	Kab. Bandung

7	1	4	2	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec.Pacet	2	Laporan	37.790.000,00	Apbd Kab	2	10.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	5	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah</i>	Kec.Pacet	100	%	131.653.800,00	Apbd Kab	100	95.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	5	2	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Pacet	100	%	131.653.800,00	Apbd Kab	100	95.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	5	2	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec.Pacet	20	Orang	47.700.000,00	Apbd Kab	20	25.000.000,00	Kab. Bandung

7	1	5	2	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec.Pacet	150	Orang	49.928.500,00	Apbd Kab	200	40.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	5	2	5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec.Pacet	1	Laporan	9.025.300,00	Apbd Kab	1	5.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	5	2	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec.Pacet	1	Dokumen	25.000.000,00	Apbd Kab	1	25.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Kec.Pacet	100	%	106.719.900,00	Apbd Kab	1	61.500.000,00	Kab. Bandung
7	1	6	2	0	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Kec.Pacet	100	%	106.719.900,00	Apbd Kab	100	61.500.000,00	Kab. Bandung
7	1	6	2	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Pacet	1	Dokumen	7.463.300,00	Apbd Kab	1	10.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	6	2	3	Fasailitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec.Pacet	12	Dokumen	17.908.600,00	Apbd Kab	13	10.000.000,00	Kab. Bandung

7	1	6	2	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec.Pacet	1	Dokumen	0,00	Apbd Kab	100%	5.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	6	2	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec.Pacet	1	Dokumen	34.900.500,00	Apbd Kab	1	20.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	6	2	14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kec.Pacet	1	Dokumen	9.948.300,00	Apbd Kab	1	6.500.000,00	Kab. Bandung
7	1	6	2	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec.Pacet	1	Dokumen	16.602.600,00	Apbd Kab	100%	5.000.000,00	Kab. Bandung
7	1	6	2	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec.Pacet	1	Laporan	19.896.600,00	Apbd Kab	1	5.000.000,00	Kab. Bandung
					Jumlah 2					942.196.091,00			415.500.000	
					Jumlah Total					6.331.770.186,56			5.128.488.000	

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan Kecamatan Pacet Tahun 2025 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi menyokong terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Kecamatan.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 disajikan pada tabel 3.2. di BAB III (pada halaman sebelumnya)

Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan yang dimaksudkan untuk mencapai Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan capaian Kinerja yang optimal sesuai dengan Perencanaan.

Tabel T-C.4.1

**Rumusan Rancangan Ahir Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Kecamatan pacet**

Kode	URAIAN	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran			Penanggung Jawab		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target capaian Kinerja Sebelum Perubahan		Target capaian Kinerja Sesudah Perubahan		Rancxangan Ahir Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
7 1 0 0 0	KECAMATAN						6.331.770.186,56	Kec. Pacet	
7 1 1 0 0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Nilai AKIP</i>	<i>Nilai AKIP</i>	80,5	<i>Poin</i>	80,5	<i>Poin</i>	5.389.574.095,56	Kec. Pacet
7 1 1 2 0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100	%	100	%	23.565.600,00	Kec. Pacet
7 1 1 2 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	850.000,00	Kec. Pacet
7 1 1 2 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	850.000,00	Kec. Pacet
7 1 1 2 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1.870.000,00	Kec. Pacet
7 1 1 2 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	850.000,00	Kec. Pacet

7	1	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1.870.000,00	Kec. Pacet
7	1	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	2	Laporan	850.000,00	Kec. Pacet
7	1	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	2	Laporan	850.000,00	Kec. Pacet
7	1	1	2	8	penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	680.000,00	Kec. Pacet
7	1	1	2	9	pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	Data	1	Data	14.895.600,00	Kec. Pacet
7	1	1	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100	%	100	%	4.577.421.967,56	Kec. Pacet
7	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	252	Orang/ Bulan	252	Orang/ Bulan	4.573.551.967,56	Kec. Pacet
7	1	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	2	Laporan	1.660.000,00	Kec. Pacet

						Keuangan Akhir Tahun SKPD							
7	1	1	2	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	Dokumen	2	Dokumen	510.000,00	Kec. Pacet
7	1	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Laporan	4	Laporan	1.360.000,00	Kec. Pacet
7	1	1	2	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Dokumen	2	Dokumen	340.000,00	Kec. Pacet
7	1	1	2	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan	100	%	100	%	2.210.000,00	Kec. Pacet
7	1	1	2	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	510.000,00	Kec. Pacet
7	1	1	2	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	2	Laporan	850.000,00	Kec. Pacet
7	1	1	2	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1	Laporan	850.000,00	Kec. Pacet
7	1	1	2	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	100	%	100	%	3.846.600,00	Kec. Pacet

7	1	1	2	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20	Orang	20	Orang	1.923.300,00	Kec. Pacet
7	1	1	2	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	Orang	20	Orang	1.923.300,00	Kec. Pacet
7	1	1	2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100	%	100	%	124.749.450,00	Kec. Pacet
7	1	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	2	Paket	10.000.000,00	Kec. Pacet
7	1	1	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	2	Paket	20.000.000,00	Kec. Pacet
7	1	1	2	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	15.000.000,00	Kec. Pacet
7	1	1	2	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	2.500.000,00	Kec. Pacet
7	1	1	2	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	Laporan	4	Laporan	7.000.000,00	Kec. Pacet
7	1	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Laporan	2	Laporan	70.249.450,00	Kec. Pacet

						SKPD							
7	1	1	2	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	100	%	90.421.900,00	Kec. Pacet
7	1	1	2	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	1	Unit	27.417.000,00	Kec. Pacet
7	1	1	2	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Unit	1	Unit	21.860.800,00	Kec. Pacet
7	1	1	2	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	1	Unit	41.144.100,00	Kec. Pacet
7	1	1	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100	%	337.500.000,00	Kec. Pacet
7	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1	Laporan	2.500.000,00	Kec. Pacet
7	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	35.000.000,00	Kec. Pacet
7	1	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	300.000.000,00	Kec. Pacet

7	1	1	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	84	%	84	%	229.858.578,00	Kec. Pacet
7	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	4	Unit	58.000.000,00	Kec. Pacet
7	1	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	5	Unit	4.858.578,00	Kec. Pacet
7	1	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1	Unit	167.000.000,00	Kec. Pacet
					Jumlah 1							5.389.574.095,56	Kec. Pacet
7	1	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,59	Poin	83,59	Poin	362.655.400,00	Kec. Pacet
7	1	2	2	0	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	%	100	%	20.182.900,00	Kec. Pacet
7	1	2	2	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan	1	Laporan	7.816.300,00	Kec. Pacet
7	1	2	2	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Dokumen	1	Dokumen	12.366.600,00	Kec. Pacet

7	1	2	2	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan	100	%	100	%	77.289.200,00	Kec. Pacet
7	1	2	2	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	1	Laporan	12.366.600,00	Kec. Pacet
7	1	2	2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	2	Laporan	64.922.600,00	Kec. Pacet
7	1	2	2	0	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	100	%	100	%	20.892.900,00	Kec. Pacet
7	1	2	2	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1	Dokumen	1	Dokumen	20.892.900,00	Kec. Pacet
7	1	2	2	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	%	100	%	244.290.400,00	Kec. Pacet

7	1	2	2	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2	Laporan	2	Laporan	244.290.400,00	Kec. Pacet
7	1	3	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	100	%	100	%	232.699.791,00	Kec. Pacet
7	1	3	2	0	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	%	100	%	57.371.200,00	Kec. Pacet
7	1	3	2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1	Lembaga Kemasyarakatan	1	Lembaga Kemasyarakatan	12.366.600,00	Kec. Pacet
7	1	3	2	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1	Dokumen	1	Dokumen	10.051.700,00	Kec. Pacet
7	1	3	2	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	1	Laporan	34.952.900,00	Kec. Pacet
7	1	3	2	0	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi	100	%	100	%	66.265.700,00	Kec. Pacet

7	1	3	2	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga Kemasyarakatan	1	Lembaga Kemasyarakatan	24.721.200,00	Kec. Pacet
7	1	3	2	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	Laporan	1	Laporan	24.913.900,00	Kec. Pacet
7	1	3	2	5	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	Laporan	1	Laporan	16.630.600,00	Kec. Pacet
7	1	3	2	0	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100	%	100	%	109.062.891,00	Kec. Pacet
7	1	3	2	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50	Keluarga	50	Keluarga	9.952.600,00	Kec. Pacet
7	1	3	2	5	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50	Keluarga	50	Keluarga	19.905.200,00	Kec. Pacet
7	1	3	2	8	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan perilaku bersih dan sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50	Keluarga	50	Keluarga	19.263.291,00	Kec. Pacet

7	1	3	2	9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50	Keluarga	50	Keluarga	9.952.600,00	Kec. Pacet
7	1	3	2	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50	Keluarga	50	Keluarga	24.994.600,00	Kec. Pacet
7	1	3	2	11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	50	Keluarga	50	Keluarga	24.994.600,00	Kec. Pacet
7	1	4	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum	100	%	100	%	108.467.200,00	Kec. Pacet
7	1	4	2		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	%	100	%	70.677.200,00	Kec. Pacet
7	1	4	2	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	1	Laporan	30.677.200,00	Kec. Pacet
7	1	4	2	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	1	Laporan	40.000.000,00	Kec. Pacet

7	1	4	2	0	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	%	100	%	37.790.000,00	Kec. Pacet
7	1	4	2	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2	Laporan	2	Laporan	37.790.000,00	Kec. Pacet
7	1	5	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah</i>	<i>Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah</i>	100	%	100	%	131.653.800,00	Kec. Pacet
7	1	5	2	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	%	100	%	131.653.800,00	Kec. Pacet
7	1	5	2	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20	Orang	20	Orang	47.700.000,00	Kec. Pacet
7	1	5	2	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	150	Orang	150	Orang	49.928.500,00	Kec. Pacet

7	1	5	2	5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1	Laporan	1	Laporan	9.025.300,00	Kec. Pacet
7	1	5	2	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	Dokumen	1	Dokumen	25.000.000,00	Kec. Pacet
7	1	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100	%	100	%	106.719.900,00	Kec. Pacet
7	1	6	2	0	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100	%	100	%	106.719.900,00	Kec. Pacet
7	1	6	2	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Dokumen	1	Dokumen	7.463.300,00	Kec. Pacet
7	1	6	2	3	Fasailitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	Dokumen	12	Dokumen	17.908.600,00	Kec. Pacet
7	1	6	2	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1	Dokumen	1	Dokumen	0,00	Kec. Pacet
7	1	6	2	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1	Dokumen	1	Dokumen	34.900.500,00	Kec. Pacet

7	1	6	2	14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1	Dokumen	1	Dokumen	9.948.300,00	Kec. Pacet
7	1	6	2	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	Dokumen	1	Dokumen	16.602.600,00	Kec. Pacet
7	1	6	2	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	1	Laporan	19.896.600,00	Kec. Pacet
					Jumlah 2							942.196.091,00	
					Jumlah Total							6.331.770.186,56	

BAB V PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan dokumen awal tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. RKPD Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dengan demikian ada keselarasan antara tema dan prioritas kabupaten dengan tema dan prioritas Kecamatan Pacet maupun nasional. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Pacet dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2025.

Dengan disusunnya Rancangan Awal Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi. Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis

Dengan komitmen dan sinergitas aparatur di lingkungan Kantor Kecamatan Pacet dan pelaksanaan evaluasi serta monitoring intern secara rutin dan terus menerus diharapkan dapat meningkatkan kinerja yang

optimal dalam rangka mewujudkan target kinerja sesuai dengan target capaian kinerja dan memberikan kontribusi terhadap kinerja pencapaian visi Kabupaten Bandung.

CAMAT PACET,

Ttd

ASEP SUSANTO

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA